

DPRD Bidik Kerugian Negara Rp10 M Lebih

MEMPAWAH. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak sejak tahun 2006-2011 lalu, mendapatkan adanya kerugian negara sebesar Rp10 miliar lebih. Kerugian tersebut menyangkut penyelenggaraan bidang konstruksi atau proyek yang direalisasikan pemerintah daerah setempat.

"Temuan BPK membuktikan adanya kerugian negara dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Pontianak. Selama lima tahun terakhir tercatat kerugian sebesar Rp10 miliar lebih. Ironisnya, sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari eksekutif untuk menutupi kerugian daerah itu," sesal Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pontianak, Susanto kepada wartawan, Rabu (22/2) di Mempawah.

Dijelaskannya, kerugian keuangan negara pada bidang konstruksi tersebut cenderung disebabkan adanya kelebihan

pembayaran yang dilakukan pengguna anggaran terhadap pelaksana kerja. Sehingga keuangan negara mengalami kerugian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Selama ini pemerintah daerah tidak melakukan upaya yang serius untuk mengembalikan kerugian daerah tersebut. Pemerintah daerah hanya memperbaiki administrasi saja, sedangkan realisasi pengembalian dalam bentuk uang masih nol," tegasnya.

Ditanya proyek mana saja yang menjadi temuan BPK tersebut, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, sedikitnya ada 24 kegiatan proyek di Kabupaten Pontianak yang menyebabkan kerugian negara. Proyek tersebut berada disejumlah instansi seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan dan lainnya.

"Yang paling dominan itu Dinas PU. Seperti, Proyek Jalan Moton Asam-Moton Pnjang dengan kerugian negara sebesar



Susanto. Alfi Shandy/Equator

Rp 1 miliar, proyek Jalan lingkaran Pasir Wan Salim Rp400 juta dan proyek Jalan Suak Barangan-Sangking sebesar Rp1,6 miliar," bebarnya.

"Kemudian, proyek Penimbunan Jalan Anjungan-Desa Tekam sebesar Rp600 juta lebih, proyek

Jalan Desa Pak Nungkat-Sangking sebesar Rp1,4 miliar, proyek Jalan Sebukit Rama-Pak Nungkat Rp400 juta, proyek Rehabilitasi Sekolah Rp148 juta dan lainnya," cecar Susanto.

Prihatin terhadap kerugian negara tersebut, Legislator PDI Perjuangan ini berencana akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPRD terkait pengembalian kerugian negara tersebut. Tentunya, pansus akan bekerja maksimal sesuai tupoksinya.

"Pansus ini dibentuk semata-mata untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD. Selain itu, kami juga ingin mengetahui apa saja kesulitan dan hambatan pemerintah daerah yang sampai saat ini belum bisa menutupi atau mengembalikan kerugian keuangan daerah yang menjadi temuan BPK tersebut," ujarnya.

Sebab, menurut Susanto, apabila kerugian negara itu dapat dikembalikan, tentu akan memberikan dampak positif untuk

keuangan daerah. Kerugian sebesar Rp10 miliar lebih itu dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Pontianak.

"Dalam kinerjanya nanti, pansus akan menghadirkan pihak-pihak terkait yang menyebabkan kerugian negara itu sendiri. Bahkan, jika memungkinkan Pansus akan mengundang BPK untuk memberikan penjelasan tentang kerugian keuangan negara dimaksud. Jadi, Pansus tidak hanya memperbaiki data, melainkan mengembalikan kerugian negara dalam bentuk uang," tegasnya lagi.

"Menyangkut hasil kerja pansus mengarah pada pidana atau bukan, tinggal kita lihat saja perkembangannya nanti. Dan akan ditindaklanjuti sesuai ranahnya. Yang pasti, hasil kerja pansus akan menjadi rekomendasi dalam menindaklanjuti temuan kerugian negara tersebut," pungkasnya. (shn)